



LITERASI MEDIA & INFORMASI dan **CITIZENSHIP**



Penulis:

M.C. Ninik Sri Rejeki
Ranggabumi Nuswantoro
Dhyah Ayu Retno Widyastuti
Olivia Lewi Pramesti
Theresia D. Wulandari
Fransisca Anita Herawati
Irene Santika Vidiadari

Editor:

Yohanes Widodo
Mario Antonius Birowo

Prakata:

Mario Antonius Birowo



LITERASI MEDIA & INFORMASI
dan

CITIZENSHIP

Penulis:

MC Ninik Sri Rejeki
Ranggabumi Nuswantoro
Dhyah Ayu Retno Widyastuti
Olivia Lewi Pramesti
Theresia D. Wulandari
Fransisca Anita Herawati
Irene Santika Vidiadari

Editor:

Yohanes Widodo
Mario Antonius Birowo

Prakata:

Mario Antonius Birowo

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2019

LITERASI MEDIA & INFORMASI
dan

CITIZENSHIP

Editor:

Yohanes Widodo

Mario Antonius Birowo

Prakata:

Mario Antonius Birowo

Penulis:

MC Ninik Sri Rejeki

Ranggabumi Nuswantoro

Dhyah Ayu Retno Widyastuti

Olivia Lewi Pramesti

Theresia D. Wulandari

Fransisca Anita Herawati

Irene Santika Vidiadari

Perancang Sampul:

Alexander Beny Pramudyanto

Tata Letak:

Yohanes Widodo

Diterbitkan oleh

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2019

xii + 80 halaman;

15,5 cm x 23 cm

ISBN: **978-602-50218-3-1**

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 6 Yogyakarta 55281

Sambutan

Jaringan Pegiat Literasi Digital

Novi Kurnia
Koordinator Japelidi

Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) adalah komunitas yang sebagian besar terdiri dari akademisi dan pegiat literasi digital yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Komunitas yang mulai beraktivitas pada tahun 2017 ini peduli pada beragam upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia. Beragam program literasi digital dilakukan baik secara kolaboratif atau di masing-masing perguruan tinggi untuk mengatasi beragam persoalan masyarakat digital.

Salah satu pekerjaan kolaboratif Japelidi yang dilakukan tahun 2017 adalah penelitian peta gerakan literasi digital di Indonesia. Penelitian yang dikoordinatori oleh Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memetakan 342 kegiatan literasi digital dengan melibatkan 56 peneliti dari 26 perguruan tinggi. Salah satu temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa ragam yang sering dilakukan dalam kegiatan sosialisasi digital adalah sosialisasi. Sedangkan kelompok sasaran yang paling sering menjadi target beragam gerakan literasi digital adalah kaum muda.

Untuk mendiskusikan hasil penelitian Japelidi sekaligus memetakan berbagai isu terkini terkait literasi digital di Indone-

sia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan Konferensi Nasional Literasi Digital pada tanggal 12 September 2017. Konferensi ini diikuti oleh 30 pemakalah dan 200 peserta. Lebih separuh dari makalah yang disampaikan dalam konferensi ini sudah dan akan diterbitkan di Jurnal Informasi UNY.

Berbeda dengan kegiatan pada tahun 2017 yang memfokuskan pada kegiatan penelitian dan konferensi, pada tahun 2018 Japelidi melakukan program penerbitan serial buku panduan literasi digital. Untuk itu, selain mengadakan serial rapat pra-workshop di Yogyakarta pada tanggal 21 dan 22 Maret 2018, Japelidi menyelenggarakan workshop penulisan pedoman buku literasi digital pada tanggal 27 dan 28 April 2018. Workshop yang dijamu oleh Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) ini diikuti oleh 30 peserta dari 13 perguruan tinggi di Indonesia dari 9 kota. Salah satu hasil workshop ini adalah perumusan 23 proposal buku panduan literasi digital yang akan disusun dan diproduksi oleh 23 perguruan tinggi dari 11 kota.

Tujuan dari penerbitan serial buku panduan Japelidi ini adalah menyediakan pustaka yang memadai sekaligus aplikatif sehingga bisa diterapkan secara langsung oleh kelompok sasaran yang dituju. Dengan begitu, buku-buku tersebut bisa dimanfaatkan untuk baik akademisi, pegiat maupun kelompok sasaran kegiatan literasi digital.

Atas terbitnya serial buku panduan literasi digital Japelidi, kami mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan seluruh pihak yang terlibat. Semoga buku-buku ini berhasil menjadi bagian dari peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia. []

SAMBUTAN

Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi

Dedy Permadi
Ketua Umum Siberkreasi

Kemajuan teknologi menciptakan disrupsi pada kehidupan sehari-hari, mulai dari otomatisasi yang mengancam ragam mata pencaharian, hingga bagaimana masyarakat mencerna dan mengabarkan informasi. Dewasa ini, lebih dari setengah populasi di Indonesia terhubung Internet. Angka penetrasi Internet makin tinggi dari tahun ke tahun. Eric Schmidt, insinyur dari Google, bahkan memprediksi pada 2020 seluruh manusia di dunia akan *online*.

Sayangnya, kemajuan inovasi digital dan kemudahan mengakses Internet belum diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Bak air maupun api, teknologi bisa dilihat sebagai anugerah sekaligus ancaman. Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, ia bisa jadi sangat berbahaya. Maka dari itu, Seri Buku Literasi Digital hasil kolaborasi para pemangku kepentingan multisektoral ini kami anggap perlu kembali diluncurkan ke publik.

Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi berterima kasih pada para mitra yang tanpa lelah mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengedukasi masyarakat. Kedewasaan, kecakapan, dan keamanan dalam menggunakan media digital sangat perlu diperjuangkan. Di balik jutaan kesempatan bagi masyarakat Indonesia pada era transformasi digital, terdapat masalah serius

yang sama banyaknya, mulai dari penyebaran konten negatif, seperti perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme daring, ketergantungan pada gawai, eksploitasi seksual dan pornografi; hingga keterbatasan kompetensi dasar menuju revolusi industri 4.0. Kami percaya bahwa pendidikan adalah pilar paling penting untuk mencegah dan menanggulangi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh penyimpangan pemanfaatan teknologi.

Literasi digital telah menjadi keharusan yang mendesak dilakukan dalam skala nasional secara masif, komprehensif, dan sistematis. Presiden Joko Widodo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 secara khusus mendorong institusi pendidikan untuk lekas beradaptasi di era revolusi industri 4.0, salah satunya dengan memantapkan kemampuan literasi digital. Sembari mengawal proses tersebut, Siberkreasi merasa perlu menyatukan pegiat literasi digital dari berbagai disiplin ilmu dan sektor untuk menyediakan sumber ilmu yang berkualitas, mudah dijangkau, serta bebas biaya.

Sasaran literasi digital perlu diperluas, sehingga dalam Seri Buku Literasi Digital kali ini kami dengan bangga mempersembahkan terbitan dari pelbagai kontributor dari bidang keahlian yang majemuk. Tema-tema literasi digital, antara lain: tata kelola digital, pola asuh digital, ekonomi digital, gaya hidup digital, dan kecakapan digital; dapat ditemui untuk dipelajari serta disebarluaskan ke khalayak ramai. Kami harap, para orang tua, siswa, anak-anak, hingga pemerintah daerah, dapat mengambil manfaat penuh dari rangkaian terbitan ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam peluncuran Seri Buku Literasi Digital 2019. Untuk para pembaca, kami sampaikan selamat menjumpai ilmu baru dan jangan segan menjadi duta literasi digital bagi sekitar. []

PRAKATA

Literasi Media dan Informasi dan Citizenship

Mario Antonius Birowo

Peradaban manusia berjalan seiring perkembangan (teknologi) komunikasi. Setiap perkembangan membawa dampaknya sendiri. Demikian pula ketika teknologi digital hadir membawa era baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kejutan-kejutan bermunculan ketika era digital hadir di masyarakat kita.

Era digital mengubah bagaimana masyarakat menggunakan informasi untuk berbagai kebutuhannya, termasuk dalam berhubungan dengan orang lain di masyarakat. Teknologi memungkinkan informasi sangat mudah diperoleh dan disebarkan oleh setiap individu. Hal ini menyebabkan individu memiliki kekuasaan besar untuk mengelola informasi yang dimilikinya.

Informasi sangat vital bagi setiap individu menentukan sikap dan tindakannya, termasuk terkait dengan fakta bahwa setiap individu hidup dalam relasinya dengan individu lain, di mana akan ada persoalan bersama yang bersinggungan dengan hak dan kewajiban. Karena itu, kemampuan pengelolaan informasi menjadi penting untuk dipelajari agar informasi menjadi alat untuk kesejahteraan manusia.

Mengapa Literasi Media dan Informasi (LMI) terkait dengan *Citizenship*? Setiap peradaban bergantung pada tersedianya pengetahuan yang disebarakan di antara masyarakat. Kualitas pengetahuan masyarakat tidak bisa terlepas dari informasi yang ada, sehingga bagaimana informasi dikomunikasikan dan diakses berperan penting bagi eksistensi suatu masyarakat.

Dalam konteks politik, bangsa Indonesia telah berkomitmen membangun sistem demokrasi yang menghargai setiap hak dan kewajiban individu secara bersamaan. Kita menyadari bahwa pada sistem demokrasi, pengambilan keputusan berdasar informasi yang ada, sehingga bisa dibayangkan jika informasi yang ada berisi data yang tidak benar! Ketika informasi diletakkan dalam konteks demokrasi, maka era digital harus bermanfaat bagi upaya memudahkan partisipasi setiap individu di dalam negara.

Literasi media dan informasi adalah pendidikan seumur hidup (*lifelong education*). LMI memberdayakan masyarakat di setiap langkah kehidupannya, membantu pengembangan dirinya guna mencapai kehidupan yang lebih baik secara sosial dan politik. Karena itu, LMI menjadi kebutuhan dasar di era digital. Dengan kata lain pada dasarnya literasi media dan informasi bertujuan sebagai alat perubahan sosial ke arah yang lebih baik dalam berhubungan dengan dunia media dan informasi digital.

Batasan jenis pendidikan sangat luas, termasuk soal *citizenship* di mana setiap warga negara perlu berpartisipasi dalam persoalan media dan informasi. Warga negara harus memiliki kompetensi (*knowledge, skills and attitudes*) untuk berhubungan dengan media dan informasi. Tujuan utama dari kompetensi di atas adalah mewujudkan warga negara yang partisipatif di dalam persoalan sosial-politik. LMI menawarkan seperangkat kompetensi yang diperlukan bagi warga untuk berhubungan dengan

situasi yang kompleks dari pesan media dan sumber informasi yang tersedia bagi mereka.

Media dikenal secara luas sebagai alat bantu bagi warga negara untuk mengambil keputusan yang berbasis informasi. Dalam konteks ini, informasi menjadi “darah” bagi kehidupan masyarakat dan media adalah urat nadi demokrasi. Karena itu menjaga informasi yang benar serta menjadi media yang bebas merupakan hal yang sangat mendasar. Inilah alasan mengapa literasi media dan informasi sangat penting bagi setiap warga negara.

Berangkat dari kegelisahan di atas, maka buku ini hadir. Buku ini merupakan salah satu produk dari pengembangan materi kuliah serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY). Buku ini ditujukan bagi kelompok remaja, yang secara sengaja dikaitkan dengan persoalan sosial-politik karena sesuai dengan bidang kajian keilmuan FISIP UAJY, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi.

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY secara khusus memasukkan mata kuliah LMI dalam kurikulum terbaru (2017). Mata kuliah ini hadir berdasarkan pertimbangan bahwa mahasiswa perlu mendekati literasi media dan informasi dengan lebih spesifik agar mereka bisa memahami lebih konkret pentingnya LMI dengan bidang profesi yang mereka geluti. LMI bertujuan untuk membangun *critical thinking* terkait dengan berbagai kasus yang bisa ditemui di masyarakat. Kasus-kasus tersebut antara lain menjadi tema dalam bab-bab di buku panduan ini.

Pendekatan tematik ditujukan untuk kebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan berbagai isu yang ada di masyarakat.

Tujuannya membangun kesadaran, *critical thinking* akan peran media di dalam mengkonstruksi pesan-pesan tertentu. Misal soal bias gender di media, mitos kesehatan, bencana, iklan yang merugikan kesehatan, seperti rokok, alkohol, *junk food*, dan lain-lain.

Tematik lebih cocok untuk kelompok *advance* atau usia mahasiswa, di mana mereka 'sudah memiliki' pengetahuan umum dalam literasi media. Tematik juga cocok untuk mempertajam kesadaran profesi tertentu, misal jurnalisme, public relations dan iklan.

Kemungkinan lain yang bisa dipikirkan adalah tematik merupakan bagian dari panduan, di mana tematik berfungsi sebagai contoh kasus atau fokus kegiatan literasi dengan segmen tertentu. Misal ketika literasi untuk ibu-ibu, maka persoalan yang bisa diangkat berupa kesehatan reproduksi, gender, perlindungan perempuan dan anak.

Di atas itu semua, buku ini ditujukan bagi kelompok remaja yang saat ini dikenal sebagai generasi millennial. Penggunaannya dapat dalam bentuk satu paket perkuliahan atau pertematik jika ditujukan untuk keperluan khusus, misalnya LMI dan Politik diberikan untuk pemilih pemula, agar mereka *aware* tentang kemungkinan munculnya hoax dalam proses Pemilu.

Kelebihan buku ini adalah kebaruan cakupan yang memasukkan literasi informasi di dalam konteks literasi media. Umumnya pembahasan hanya berpusat pada literasi media. Mengingat keduanya tidak bisa dipisahkan, maka kami menggunakan konsep literasi media dan informasi seperti usulan UNESCO.

Agar isi buku ini relevan buat remaja, maka kami mengembangkannya berdasar materi yang diberikan di ruang kuliah. Diskusi dari ruang kuliah yang diperoleh oleh para nara sumber

serta kekayaan pengetahuan yang mereka kembangkan, membuat materi buku ini kaya akan ragam perspektif.

Isi Buku

Bab 1: LMI dan Dialog Antarbudaya (Multikulturalisme dan citizenship). Bab ini membahas peran LMI dalam mempromosikan kehidupan multikulturalisme. Indonesia sebagai negara multikultural, tidak terlepas dari isu-isu di media yang berpotensi mengganggu hubungan antar warga negara. Penulis membahas beberapa aspek pokok seperti pengertian multikulturalisme, pentingnya kesadaran multikulturalisme bagi generasi millennial, problem yang muncul di media terkait multikulturalisme, sikap dan tindakan yang perlu dimiliki remaja di dalam penggunaan media untuk mendukung multikulturalisme (terkait potensi media untuk kampanye multikulturalisme).

Bab 2: LMI dan Politik: Pemilu. Bab ini membahas penggunaan media dalam proses pemilu, di mana masing-masing pihak memaksimalkan potensi media untuk mempersuasi calon pemilih dan menyuarakan pandangan politiknya. Persoalan muncul ketika dalam suasana hangat, ada pihak-pihak yang memancing di air yang keruh, menggunakan media secara tidak etis. Mereka menggunakan media untuk menghujat, memanipulasi fakta, menyesatkan informasi dan melontarkan kampanye hitam, juga membuat hoax. Kapasitas dalam LMI membantu para calon pemilih untuk menentukan pilihannya.

Bab 3: LMI dan Gender. Bab ini membahas potensi bias gender di dalam pemberitaan media. Perempuan sering menjadi korban dalam pemberitaan kekerasan dan seksual, di mana perempuan menjadi objek eksploitasi media. Bias gender, seperti bias lainnya, akan memunculkan sikap dan perilaku yang tidak

adil terhadap pihak yang terkena. Karena itu kesadaran untuk terhindar dari bias gender perlu dimiliki oleh remaja.

Bab 4: LMI dan Kebebasan Berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keberadaan atau eksistensi manusia dapat dijamin dari adanya kebebasan ini karena melalui kebebasan berekspresi, kedaulatannya sebagai manusia akan dihargai. Kebebasan ini ditandai dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Bahkan salah satu perwujudannya adalah dasar bagi adanya kebebasan pers.

Bab 5: LMI dan Konglomerasi Media (Etika Media). Demokrasi dapat terjaga jika terdapat pers yang bebas sehingga pers bisa menyuarakan kebenaran, termasuk kontrol terhadap pemegang kekuasaan. Karena posisi penting itu, pers ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Tidak mengherankan jika ancaman terhadap kebebasan pers berarti ancaman terhadap demokrasi. Namun kebebasan ini terancam tidak hanya oleh pihak eksternal di perusahaan pers, tetapi juga dari dalam, yaitu dari pemiliknya. Mengingat pemilik berpotensi memengaruhi suara pers, maka dominasi kepemilikan pers (konglomerasi media) dapat dipandang akan mengganggu etika pers sehinggabias dalam penyajian fakta.

Bab 6: LMI dan Iklan. Media swasta hidup dari pemasukan dana iklan. Pada titik ini, godaan muncul untuk menerima iklan tanpa berpikir panjang soal isi pesan iklan. Karena itu iklan bisa mengancam orientasi media untuk melulu ke komersialisme (profit oriented). Sejatinya iklan dapat membantu masyarakat untuk menemukan produk yang dibutuhkannya. Remaja sebagai salah satu kelompok sasaran iklan perlu memiliki kompetensi untuk mencerna isi pesan iklan.

Bab 7: LMI dan Kesehatan. Seiring dengan kemudahan akses ke Internet, informasi tentang kesehatan sangat banyak tersedia. Media merupakan saluran yang penting bagi sosialisasi informasi kesehatan. Literasi media dan informasi dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki kondisi kesehatannya. Berbagai informasi kesehatan terentang dari kebutuhan informasi untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran, pengetahuan kesehatan reproduksi, hingga ke penyembuhan penyakit-penyakit tertentu. Tidak semua informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan, bahkan beberapa bersifat mitos yang kebenarannya patut dipertanyakan. Adapula misinformasi tentang kesehatan yang dapat membahayakan/memperparah kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Buku ini masih banyak kekurangan, namun dengan hadirnya buku ini kami percaya bahwa kami sudah membuka rintisan untuk membangun literasi media dan informasi secara sistematis bersama-sama dengan teman-teman pegiat Literasi Digital di Indonesia (JAPELIDI). Kami sadar bahwa dorongan semangat dari teman-teman penulis, tim editor, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi serta para pegiat maka membuat buku ini terbit.[]

Daftar Isi

Sambutan - Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi)	i
Sambutan - Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi	iii
Prakata: Literasi Media & Informasi dan Citizenship - Mario Antonius Birowo	v
Daftar Isi	xii
Bab 1: LMI dan Dialog Antarbudaya - MC Ninik Sri Rejeki	1
Bab 2: LMI dan Politik: Pemilu - Ranggabumi Nuswantoro	14
Bab 3: LMI dan Gender - Dhyah Ayu Retno Widyastuti	24
Bab 4: LMI dan Konglomerasi Media - Theresia D. Wulandari	33
Bab 5: LMI dan Kebebasan Berekspresi - Olivia Lewi Pramesti	44
Bab 6: LMI dan Iklan - Fransisca Anita Herawati	56
Bab 7: LMI dan Kesehatan - Irene Santika Vidiadari	67
Profil Penulis	76
Profil Editor	80

BAB 2

LMI dan Politik: Pemilu

Ranggabumi Nuswantoro

Beberapa waktu terakhir, istilah pemilu, pileg, atau pilpres sering muncul ke permukaan. Pada masa kampanye, hampir semua media mengangkat hal tersebut. Kita perlu memperdalam pengetahuan mengenai pemilu, maupun politik pada umumnya, supaya nantinya bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Caranya bagaimana? Yakni dengan memilih secara langsung wakil-wakil yang akan duduk di lembaga negara (eksekutif/legislatif). Hal ini terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia berbasis demokrasi perwakilan, di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh para wakil yang diberi mandat untuk melaksanakan amanat pembangunan seperti bagaimana tertuang di Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu adalah ruang bagi warga yang punya mandat untuk memilih mereka yang dianggap pantas, baik, memiliki kapabilitas, untuk mengemban amanat pembangunan. Pemilu merupakan kesempatan warga untuk memilih mereka yang ada di eksekutif, meliputi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota dan wakil wa-

likota. Juga di legislatif, meliputi DPR di tingkat pusat, dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota.

Berbicara mengenai pemilu berarti berbicara mengenai hak sekaligus kewajiban warga negara. Kewajiban, karena sebagai warga negara harus terlibat aktif dalam usaha melaksanakan pembangunan negara, juga karena itu amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Sebagai hak, kita sebagai warga memiliki pilihan politik yang berbeda-beda. Ketika melihat realitas politik di lapangan yang tidak melulu baik, sebagian warga mungkin berpikir tidak ada gunanya memberikan suara karena tidak memberi dampak signifikan. Walau demikian, Pemilu tetap penting karena menjadi satu-satunya cara bagi warga untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga negara.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat pemilu menjadi penting. *Pertama*, Pemilu menjadi sarana demokrasi legal untuk memilih wakil di lembaga eksekutif dan legislatif yang akan membuat kebijakan sebagai dasar melakukan proses pembangunan.

Kedua, Pemilu penting bagi proses konsolidasi demokrasi di negara kita, Indonesia. Mengingat situasi politik yang sehat baru sepenuhnya didapat di era reformasi, yang muncul di masa tahun 1998. Artinya, dalam konsolidasi demokrasi, lembaga-lembaga negara harus bisa berfungsi dengan baik. Supaya bisa berfungsi dengan baik, harus ada orang-orang baik yang duduk di sana. Di sinilah letak partisipasi penting kita sebagai warga negara.

Ketiga, dengan terlibat dalam Pemilu, maka kita punya kesempatan untuk juga mengontrol jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Sebagai warga kita memberikan suara.

Ketika kita memilih wakil, ada beberapa hal yang bisa kita cermati ketika mereka memang benar-benar terpilih (baik di ekse-

kutif maupun legislatif). Apakah janji-janjinya dipenuhi, apakah komitmennya terhadap agenda-agenda reformasi ditaati, apakah komitmennya terhadap agenda anti korupsi dilaksanakan, dan sebagainya.

Perilaku Memilih Dalam Pemilu

Saiful Mudjani, William Liddle, dan Kuskridho Ambardi yang melakukan studi tentang Pemilu 1999, 2004, dan 2009 dalam buku berjudul *“Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif Dan Presiden Indonesia Pasca-Order Baru”*, mendapatkan fakta bahwa kecenderungan perilaku pemilihan Indonesia sejak reformasi hingga sekarang itu meningkat kualitasnya.

Pada awalnya warga masih memilih dengan perspektif sosiologis, dengan melihat kesamaan suku, agama, geografis, sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan. Lambat laun warga memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Warga melakukan kalkulasi politik atas situasi yang terjadi di sekitar mereka. Apakah stagnan, membaik, atau justru jadi buruk? Warga akan menghubungkan situasi tersebut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, menjadikannya sarana evaluasi. Warga juga akan melihat janji-janji politik para kandidat, apakah sekiranya akan membuat situasi jadi lebih baik atau tidak.

Munculnya golput sering diartikan sebagai kondisi yang wajar. Apalagi di awal dinyatakan bahwa memilih selain kewajiban juga hak. Namun apakah benar demikian? Golput bagaimana pun merupakan pilihan tindakan yang menggerogoti proses demokrasi dalam Pemilu. Sebab warga kehilangan kedaulatan politiknya, ketika memilih untuk tidak memilih partai politik, calon presiden/ wakil presiden, maupun calon legislatif.

Meski dilabeli sebagai tindakan rasional, namun tetap harus diwaspadai kemungkinan golput yang dilakukan sekadar mengikuti emosi atau logika-logika politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perilaku memilih seperti ini harus diwaspadai sebab cenderung merugikan kelangsungan demokrasi.

Lebih lanjut bisa dijelaskan kerugian yang muncul. Pertama, kita tidak terlibat dalam proses untuk memilih orang-orang baik untuk duduk dalam lembaga-lembaga negara. Memang, setiap kontestan pemilu pasti melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian orang. Ada cara positif, ada pula cara negatif. Ketika mereka justru melakukan cara-cara negatif, dan warga menjadi terpengaruh cara-cara negatif ini, maka sebenarnya proses pemilihan wakil rakyat sudah cacat etika. Dengan memilih untuk tidak terlibat maka kita melakukan pembiaran atas proses yang buruk.

Kedua, jika tidak memilih, maka sebagai warga kita tidak punya golden ticket untuk memberikan kontrol atas jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Jika kita memberikan suara, maka secara konstitusional kita punya hak untuk mengkritisi para wakil yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Kita bisa mengkritisi kebijakannya, proses pengambilan keputusannya, dan sebagainya.

Pemilu dan Kontrol Terhadap Negara

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, ketika sebagai warga kita memberikan suara saat pemilu maka kita bisa terlibat aktif dalam upaya mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Baik kepada lembaga eksekutif selaku pelaksana undang-undang, maupun kepada lembaga legislatif selaku perancang undang-undang.

Jika di masa lalu saluran untuk melakukan kontrol sedikit, tidak demikian adanya di masa sekarang. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan banyak aplikasi, atau saluran komunikasi baru berbasis media digital, yang bisa kita pakai untuk menyalurkan pemikiran kita tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu yang bisa dilakukan ialah menyuarkan sikap kritis lewat akun media sosial. Sebagai warga kita berhak menyuarkan sikap kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah, tentu saja kritiknya konstruktif yakni memberi efek positif pada perbaikan keadaan yang kurang. Selain lewat media sosial, kita bisa menyalurkan kritik lewat official account yang dipunyai oleh lembaga-lembaga negara.

Sebagai amanat era keterbukaan informasi yang dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap lembaga negara wajib memiliki saluran komunikasi terbuka yang bisa diakses oleh warga. Lewat akun resmi tersebut kita bisa menyampaikan kritik, masukan, atau saran terkait berbagai hal. Mulai dari keluhan terhadap layanan publik, hingga hal yang lebih substansial tentang kebijakan-kebijakan negara.

Jika kritik kita terkait dengan hal penting dan mendesak, serta harus mendapat perhatian dari lembaga yang berwenang, kita bisa memanfaatkan saluran seperti Change.org. Saluran ini memberi kesempatan kepada kita, warga negara, untuk membuat petisi online terhadap suatu hal. Kita juga bisa menggalang dukungan dari publik, supaya bisa mendapatkan perhatian dari publik tentang persoalan yang kita anggap penting untuk diselesaikan.

Kampanye Pemilu

Dalam rangka memenangkan simpati publik yang berujung pada pencoblosan di hari-H, setiap peserta pemilu melakukan kampanye. Kampanye adalah proses dari peserta pemilu untuk mengkomunikasikan visi misi mereka sebagai kandidat baik di eksekutif maupun di legislatif. Nantinya kandidat mau melaksanakan program kerja apa, berkegiatan apa saja untuk masyarakat, dan sebagainya.

Kampanye adalah proses pengenalan diri, kemudian memberi janji/komitmen kepada konstituen untuk melakukan kerja yang terbaik. Pada titik ini perlu diperhatikan hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam sebuah kampanye pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengatur mengenai kampanye pemilu. Pasal 69 ayat (1) tertulis bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang untuk mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membahayakan keutuhan negara.

Kampanye juga dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu lain. Juga tertulis aturan mengenai larangan adu domba, ancaman kekerasan, pengrusakan alat kampanye dan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan, serta pelarangan pemberian uang/materi.

Seyogyanya kampanye juga berlangsung dua arah, antara kandidat dengan konstituen. Keduanya bisa berdialog mengenai arah pembangunan politik ke depan. Kampanye dua arah ini sejalan dengan semangat menjadikan pemilu sebagai perhelatan yang dilandasi pemikiran rasional dan terukur, tidak semata emosional.

Persoalannya, ketika mencermati kampanye dalam beberapa pemilu terakhir, kebanyakan masih satu arah. Mengapa demikian? Media-media yang dipakai untuk melakukan kampanye kurang memberi ruang kepada konstituen untuk menyampaikan feedback atas materi kampanye partai politik atau seorang kandidat.

Misalnya, partai politik atau kandidat hanya membuat billboard, spanduk, poster, dan disebar di tempat-tempat umum, pohon (memakai paku dan melukai pohon). Warga minim ruang untuk menanggapi janji-janji kampanye, serta kegiatan atau program yang diusung lima tahun ke depan. Model kampanye yang dikembangkan seyogyanya dialogis.

Media dan Pemilu

Media memainkan peran penting dalam pemilu. Kemampuannya dalam membentuk dan mengarahkan opini publik tidak diragukan lagi. Karena itu pada setiap perhelatan pemilu, media-media selalu menjadi incaran partai politik atau para kandidat. Jika diamati lebih lanjut, cukup banyak petinggi media yang masuk partai politik dan menjadi tim sukses.

Kondisi ini harus diwaspadai, menapa? Patut dicurigai kemungkinan munculnya konglomerasi media yang mengerucut pada salah satu kekuatan politik tertentu. Maka perlu diusahakan supaya media tetap netral. Dengan demikian media bisa memberitakan pemilu dengan obyektif, memberikan informasi yang berbobot namun adil dan tidak berat sebelah.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, warga harus punya pengetahuan yang cukup untuk memilah dan memilih media. Mana yang benar-benar obyektif, dan mana yang partisan. Media partisan tentu harus dihindari supaya tidak menjebak warga,

serta menggiring dalam opini sesat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menjadi Pemilih Cerdas

Bagaimana menjadi pemilih cerdas dalam pemilu? Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan:

1. Memastikan terdaftar sebagai pemilih. Kita bisa menelusuri posisi sebagai pemilih di website resmi KPU, dengan cara menuliskan nama dan nomor identitas yang berlaku. Setelah yakin terdaftar sebagai pemilih, selanjutnya yang harus dipastikan ialah bekal pengetahuan yang cukup untuk memilih. Dari mana sumber-sumber pengetahuan tersebut didapatkan? Salah satu yang bisa diakses adalah www.rumahpemilu.org. Website tersebut disediakan oleh KPU bagi pemilih pemula. Informasi yang disediakan beragam, mulai dari apa itu pemilu, proses apa saja yang ada di pemilu, kampanye pemilu, saringan untuk memilih kandidat (memperhatikan rekam jejak), dan sebagainya.
2. Mendekatkan kita dengan realitas sosial politik yang ada di sekitar, baik tingkat nasional maupun lokal. Kita bisa mulai mengakses informasi-informasi sosial politik di media. Dengan demikian kita sebagai warga mulai tahu isu-isu politik dan pandangan-pandangan yang muncul. Kita bisa menengarai partai politik atau kandidat mana yang sebenarnya punya komitmen terhadap Indonesia, atau sebaliknya.
3. Memperbanyak diskusi seputar pemilu. Diskusi bisa dilakukan bersama keluarga, teman, atau sahabat. Mulai dari hal-hal yang kecil seputar kondisi di sekitar, sampai hal-hal ideologis. Diskusi-diskusi kecil seputar pemilu itu penting sebab dari situ terjadi proses pendidikan politik.

4. Memperhatikan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat total 11 prinsip, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Semua prinsip tersebut penting, namun ada tiga yang paling pokok yakni prinsip mandiri, jujur, dan adil. Pemilu harus berlangsung dengan jujur, kemudian memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemandirian. Artinya pemilu harus kita selenggarakan dalam kemandirian kita sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, termasuk kita konstituen yang memiliki hak pilih dalam pemilu. []

Pustaka

- Mujani, Saiful, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Order Baru*. Jakarta: Mizan
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
- PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Tips Menggunakan Media untuk Menjadi Pemilih Cerdas

	Kebutuhan Informasi	Media Massa atau Website yang Bisa Diakses
1.	Mengikuti isu-isu sosial politik terkini dengan cara mengakses berita-berita yang berkaitan dengan pemilu/kegiatan politik lain	Media massa, atau media online, yang sudah disertifikasi oleh Dewan Pers (https://dewanpers.or.id/) dan International Fact-Checking Network at Poynter (https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/)
2.	Memastikan terdaftar sebagai pemilih dalam sebuah pemilihan umum	https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/
3.	Melihat profil calon anggota legislatif yang terdaftar dalam sebuah pemilihan umum	https://jariungu.com/ https://calegpedia.id/#/manual
4.	Mencari referensi bacaan yang bisa dibaca sebagai asupan pengetahuan tentang literasi digital	http://literasidigital.id/
5.	Mencari referensi bacaan yang bisa dipakai sebagai bahan untuk menangkal hoax	http://literasidigital.id/books/antisipasi-hoaks/
6.	Mencari berbagai aturan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif mengenai pemilihan umum	https://www.rumahpemilu.id/

Profil Penulis

Dr. MC Ninik Sri Rejeki, M. Si.

Staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lulus Program Doktor Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia tahun 2007 dengan disertasi tentang Komunikasi Antarbudaya (KAB). Lulus Strata 2 dari Institut Pertanian Bogor Jurusan Ilmu Penyuluhan Pembangunan, dan Strata 1 dari Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Komunikasi. Fokus kajian tentang Komunikasi Antarbudaya dikaitkan dengan persoalan dalam komunikasi pembangunan. Ini sesuai dengan pengalamannya sebagai asisten peneliti pada Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan UGM (1990-1994). Kontak email: mcninik_srirejeki@yahoo.co.id.



Ranggabumi Nuswantoro, M.A.

Menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi di FISIP UAJY, S2 Ilmu Komunikasi & Media di Fisipol UGM. Saat ini mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY, dengan peminatan topik riset tentang media sosial, demokrasi digital, dan komunikasi politik. Beberapa buku yang telah ditulisnya: *Membangun Indonesia-Resolusi Konflik Sosial Lintas Perspektif* (IQRA, 2018), *Komunikasi dalam Keragaman* (Litera, 2017), *Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru* (Combine, 2016). Email: ranggabumi.nuswantoro@uajy.ac.id



Dhyah Ayu Retno Widyastuti, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak 2010. Peminatan bidang kajian dan riset yaitu gender, komunikasi strategis, IMC & digital marketing. Lulus Magister tahun 2008 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Karya Ilmiah: *Literasi Digital, Upaya Mengembangkan UMKM di Era Digital* (buku-2018); *Interaktivitas Brand Axe dan Dove Berdasar Perspektif Gender* (Jurnal Ilmu Komunikasi-Terakreditasi, 2017); *'Bakulan RT 36', Web Media for Supporting Women's Economic Empowerment in Yogyakarta* (International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 2016); *Literasi Digital bagi Perempuan Pelaku Usaha Produktif* (Jurnal Ilmu Komunikasi Aspikom-Terakreditasi, 2016); *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterbatasan Perempuan dalam Mengakses Teknologi Komunikasi dan Informasi* (Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial-Terakreditasi LIPI, 2013).



Olivia Lewi Pramesti, MA



Staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ia memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) di Jurusan Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2013. Minat risetnya di antaranya jurnalisme, hukum dan etika media, media dan isu kebencanaan, serta literasi media. Karya Ilmiah: *Sport, Komunikasi, dan Audiens, Arena Olahraga dalam Diskursus Ekonomi-*

Politik, Bisnis, dan Cultural Studies (2014-ASPIKOM), *Media Terpenjara*

Bayang-bayang Pemilik dalam Pemberitaan Pemilu 2014 (2015-TIFA Foundation dan Masyarakat Peduli Media), *Modul Pelatihan Jurnalisme Online "Jurnalisme Online: Memberi Bobot Publik"* (2016-Digi Journalism UGM-TIFA Foundation), *Inspirasi Alumni, Berbagi Kisah Sukses Perjalanan Hidup* (2016- UAJY), dan *Kualitas Jurnalisme Publik di Media Online: Kasus Indonesia* (2017-Gadjah Mada University Press-Digi Journalism UGM). Penulis dapat dihubungi melalui olivialewiprames-ti@gmail.com.

Theresia D. Wulandari, S.Fil., M.M.



Staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan pendidikan S2 di Magister Manajemen konsentrasi Komunikasi di Universitas Trisakti Jakarta. Sebagai mantan jurnalis, penelitian dan pengajarannya diarahkan pada isu-isu kajian manajemen media, literasi media, serta media dan gender. Saat ini penulis tengah menempuh pendidikan Program PhD di School of Communication, Universiti Sains Malaysia. Kontak email: iniwulan80@gmail.com

Fransisca Anita Herawati, S.IP, M.Si

Lahir di Yogyakarta, 11 Juni 1972. Lulus dari Diploma-3 Program Studi Pemasaran Fakultas Ekonomi, UGM (1994), sembari menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM (1997). *Marketing Officer* di Bank Central Dagang, Jakarta (1997-1998). Memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta akibat



kerusuhan Mei 1998, dan memilih menjadi dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga sekarang. Menyelesaikan studi magister Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta (2004), kini tengah menempuh studi doktoral pada Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Karya tulis: *Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi* (1999, editor); *Dasar-Dasar Komunikasi untuk Penyuluhan* (2000, penulis ke-2); *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi* (2004, kontributor); *Communication Review: Catatan tentang Pendidikan Komunikasi di Indonesia, Jerman dan Australia* (2012, kontributor); *The 50 Golden Research Project of Atma Jaya Yogyakarta University* (2015, kontributor); *Suara Rakyat Suara Keistimewaan* (2015, penulis ke-2); *Perspektif Komunikasi Organisasi: Tantangan Teoritis dan Implementasi di Lapangan* (2019, kontributor). Email: anita.herawati@uajy.ac.id

Irene Santika Vidiadari, M.A.

Staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Menyelesaikan studi S2 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Fokus kajiannya antara lain Budaya Pop, Gender, Isu Lingkungan dan kesehatan. Aktif menulis buku bersama mahasiswa dalam kumpulan tulisan *Catatan Akhir Kelas Komik dan Kartun* (2018) dan *Potret Realitas Gender: Refleksi Kritis Komunikasi dan Gender* (2019). Kontak penulis via email irene_santika@staff.uajy.ac.id



Profil Editor

Yohanes Widodo S.Sos., M.Sc.



Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak 2010. Lulus Strata 1 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1999) dan program *Master in Applied Communication Science* dari Wageningen University, The Netherlands (2009). Fokus kajiannya tentang media, jurnalisme, dan media baru. Mantan Sekretaris Jendral Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda sekaligus salah satu pendiri Radio PPI Dunia. Saat ini bergabung dalam Jaringan Pegiat Literasi Media (Japelidi), Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) dan menjadi editor di Jurnal AS-PIKOM. Email: yohanes.widodo@uajy.ac.id.

Mario Antonus Birowo, Ph.D.



Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak 1993. Lulus program doktor *Communication Science* tahun 2010 dari Curtin University, Australia. Fokus kajiannya pada pemberdayaan masyarakat melalui informasi, seperti Komunikasi Bencana dan Literasi Media dan Informasi. Saat ini bergabung dalam Program Radio Darurat untuk Masyarakat

Tanggung (Radar Tangguh) bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Combine Resource Institution, FMYY Community Media & AMARC Asia Pacific (dengan dukungan Japan International Corporation Agency); serta bergabung dalam Jaringan Pegiat Literasi Media (Japelidi).